

## BAB V

### KESIMPULAN

Kesimpulan adalah penafsiran atau pemaknaan terhadap semua hasil penemuan berdasarkan rumusan masalah. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- A. Pada masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III ditemukan Kerajaan Brunei dengan konstruksi yang baru dan dianggap modern pada masanya yaitu konstruksi demokrasi. Sultan berharap dengan demokrasi, Brunei mampu mensejajarkan dirinya dengan Indonesia yang pada pertengahan abad ke-20 sudah merdeka. Jiwa zaman memberikan peluang kepada Sultan Omar Ali Saifuddin III untuk menyelamatkan dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia Brunei demi mempersiapkan kemerdekaanya.
- B. Meningkatkan partisipasi politik rakyat adalah kebijakan yang menonjol dalam menempuh proses demokrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan perubahan struktur dan jumlah anggota *Majlis Mesyuarat Negeri* (MMN) yang menunjukkan pertambahan jumlah anggota dari kalangan rakyat Brunei yang ditunjuk Sultan Omar Ali Saifuddin III. Selain itu, dibentuk *Majlis Mesyuarat Penasehat Daerah* (MMPD) sebagai jembatan untuk membangun komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sehingga, mewujudkan transparansi berbagai kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Pemilihan umum sebagai instrument demokrasi turut mewarnai demokratisasi di Brunei.

Pemilu tingkat daerah yang terselenggara sangat kompetitif karena diikuti oleh tiga partai dan satu calon independen yang bersaing sehat. Pemilu tersebut pun memberikan gambaran suara mayoritas rakyat Brunei tentang solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi Kerajaan Brunei pada saat itu.

Proses demokrasi sebagai yang implementasi dari Konstitusi atau Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei 1959 mengalami beberapa kendala sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara prinsip demokrasi dengan falsafah hidup masyarakat Brunei. Prinsip demokrasi mengandung kebebasan berpendapat sehingga suara mayoritas rakyat adalah suara Tuhan dalam arti suara yang harus ditaati atau dijadikan kebijakan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa. Sedangkan, falsafah masyarakat Brunei adalah Melayu Islam Beraja. Islam harus dijadikan patokan dalam berpendapat. Ketika terdapat suara mayoritas rakyat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka akan diabaikan. Beraja atau Kerajaan mengeluarkan keputusan yang diyakini didasarkan pada pertimbangan yang membawa kebaikan bagi rakyat Brunei. Begitupun, raja atau sultan harus ditaati secara penuh karena diyakini bahwa sultan pun seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulullah.
2. Feodalisme sebagian aparat pemerintahan tradisional Brunei. Pejabat-pejabat tradisional kerajaan Brunei dan sultan sendiri masih menganggap bahwa perubahan harus muncul dari atas ke bawah, dari sultan kepada

rakyat. Sedangkan, dalam kehidupan demokrasi pihak manapun baik individu yang berasal dari kalangan rakyat atau organisasi yang membawa suara rakyat akan mendapat tempat sebagai pembaharu.

3. Ketidaksesuaian antara Sistem Monarki dengan Demokrasi. Sistem Monarki memusatkan pemerintahan, kebijakan maupun keputusan pada tangan raja atau sultan. Sedangkan, demokrasi membagi kekuasaannya pada beberapa institusi yang idealnya akan berjalan saling melengkapi, mengawasi dan mengoreksi, sehingga pemerintahan berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat dan secara penuh bertanggungjawab kepada rakyat.
- C. Kendala diatas melahirkan respon berupa ketidakpercayaan dari pihak partai politik terutama Partai Rakyat Brunei. Ketidakpercayaan itu muncul setelah mereka masuk dalam jajaran pemerintahan, berupaya melakukan pembaharuan sesuai visi dan misi mereka, tapi kandas oleh penolakan-penolakan yang cenderung bermotif mempertahankan status quo. Ketidakpercayaan itu diungkapkan dengan tindakan anarki yaitu pemberontakan. Walaupun, pemberontakan inipun adalah "kecelakaan organisasi". Maksudnya, keputusan untuk melakukan pemberontakan adalah inisiatif dari sayap militer Partai Rakyat Brunei saja tidak dikomunikasikan terlebih dulu dengan pejabat penting Partai Rakyat Brunei yang sedang duduk di kursi pemerintahan. Sehingga, banyak yang menyayangkan tindakan para kader Partai Rakyat Brunei tersebut.

Pemberontakan yang menimbulkan kerusakan, korban dari rakyat Brunei sendiri dan ketidakstabilan pemerintahan melahirkan kecaman dari berbagai pihak. Namun, memberikan peluang dan alasan kuat bagi sultan untuk kembali pada gaya pemerintahan lama, yaitu meminimalisasi pengaruh organisasi politik dan hanya ada dua kepentingan dalam Kerajaan Brunei yaitu sultan (atas nama rakyat Brunei) dan perwakilan pemerintahan kolonial Inggris di Brunei. Maka, sampai akhir kepemimpinannya sistem pemerintahan "struktur baru bergaya lamalah" yang dianggap dapat memberikan kebaikan bagi kehidupan rakyat Brunei.